

---

# 60 Ribu Anak Korban Wisatawan Seks di Asia Tenggara

*Home Stay* Berisiko Tinggi - Sanur Bagian sangat Signifikan

WORLD Travel and Tourism Council (2004) menyebutkan, pariwisata merupakan industri terbesar di dunia. Mengingat pariwisata menggabungkan banyak sektor seperti industri yang terkait keramahtamahan, jasa boga, dan persewaan kendaraan, maka pariwisata mempekerjakan lebih dari 8% tenaga kerja dunia dan menghasilkan lebih banyak uang dibandingkan industri lain dalam ekonomi global. Tahun 2005, jumlah wisatawan mancanegara lebih dari 800 juta orang dan menghasilkan lebih dari dua miliar dolar AS per hari.

Pertumbuhan industri pariwisata di Asia Tenggara tiap tahun pun meningkat. “Tahun 2006, kunjungan turis mancanegara meningkat 9%. Pariwisata menjadi salah satu kunci dalam pembangunan ekonomi,” ujar Chin Chanveasna, *Executive Director ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes)* Kamboja dalam *Southeast Asia Conference on Child Sex Tourism*, di Sanur, 18-20 Maret.

“Indonesia, Thailand, Filipina, Kamboja, dan Vietnam, merupakan negara yang memiliki reputasi sebagai destinasi wisata untuk tujuan eksploitasi seksual komersial terhadap anak,” ungkapnya. Salah satu bentuk eksploitasi seksual komersial yang kini mendapat perhatian besar masyarakat dalam 15 tahun terakhir ini adalah pariwisata seks anak. Pariwisata seks anak mengacu pada eksploitasi seksual anak dalam pariwisata yang terjadi di berbagai daerah tujuan wisata dan bahkan di tempat-tempat yang sebenarnya tidak memiliki prasarana pariwisata samasekali.

“Pelaku pariwisata seks anak adalah orang yang melakukan perjalanan dari daerah asalnya ke daerah tujuan, dalam satu negara atau dari satu negara ke negara lain, untuk melakukan hubungan seksual dengan anak-anak,” papar Chin. Para wisatawan seks anak ini bisa merupakan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Menurut Chin, ada tiga kategori wisatawan seks anak, yaitu wisatawan seks anak situasional, wisatawan seks anak preferensial, dan pedofil. Wisatawan seks anak situasional sebenarnya tidak memiliki kecenderungan seksual khusus terhadap anak-anak. Tetapi, mereka memiliki kesempatan melakukan hubungan seksual dengan seseorang di bawah 18 tahun dan memanfaatkan kesempatan itu. Wisatawan seks anak preferensial menunjukkan keinginan melakukan seks secara aktif terhadap anak-anak. Meski mengalami ketertarikan seksual terhadap orang dewasa, mereka aktif mencari anak-anak untuk melakukan hubungan seksual. Umumnya, wisatawan seks anak preferensial mencari anak-anak yang masih puber atau remaja. Pedofil menunjukkan kecenderungan seksual khusus terhadap anak-anak yang belum puber. Walau dianggap menderita gangguan klinis, pedofil bisa saja tidak menunjukkan pilihan terhadap jenis kelamin anak dan beranggapan bahwa hubungan seks dengan anak-anak tidak berbahaya. “Wisatawan seks anak preferensial dan pedofil hanyalah sebagian kecil wisatawan seks anak,” ujar Chin. Beberapa negara asal wisatawan seks anak adalah Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, dan Australia.

“Tetapi, kita tidak boleh menutup mata, bahwa wisatawan seks anak itu juga merupakan wisatawan domestik,” kata Frans van Dijk, *Regional Director of Terre des Hommes*, Belanda. Prof. Irwanto, Ph.D. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Atma Jaya Jakarta menambahkan, “Walaupun banyak kasus dilakukan orang asing, yang paling banyak mengakses wisata seks adalah orang pribumi. Tak sedikit industri pariwisata yang menawarkan anak-anak untuk berhubungan seksual. Ini kultur yang ada di kalangan laki-laki kita.”

### **Korban 60 Ribu**

Prof. Marco Scarpati dari Milano University, Italia, mengatakan, dari total wisatawan seks anak, jumlah pedofil 5%. “Wisatawan seks anak preferensial 30% dan sisanya, 65%, wisatawan seks anak situasional,” ujar *President of ECPAT Italia* ini. Hasil risetnya menunjukkan, wisatawan seks anak tertinggi berusia 31 s.d. 40 tahun, yaitu 34%, disusul wisatawan seks anak berusia 18 s.d. 30 tahun, 30%; wisatawan berusia 41 s.d. 50 tahun, 19%, dan wisatawan berusia 51 s.d. 80 tahun, 17%. Mereka umumnya berada di kalangan berpendapatan menengah ke atas, yaitu 50%; kalangan menengah, 45%; dan kalangan atas 5%. Ketiga kategori wisatawan seks anak itu rela mengeluarkan banyak uang dan waktu asalkan dapat memuaskan keinginan mereka.

“Dari seluruh kasus, 90%-95% wisatawan seks anak adalah laki-laki,” ungkap Marco. Persentase itu sama dengan wisatawan seks anak melalui

internet. 10% s.d. 25% dari mereka adalah homoseksual. Anak-anak yang menjadi korban berusia 13 s.d. 17 tahun, 60%; berusia 7 s.d. 12 tahun, 30%; dan berusia s.d. 6 tahun, 10%. “Jika wisatawan seks anak adalah perempuan, korbannya adalah remaja. Tetapi, kondisi itu tidak dirasakan sebagai sesuatu yang negatif jika orientasinya adalah heteroseksual. Umumnya, gigolo dianggap tidak terlalu negatif dibandingkan prostitusi,” ungkap Marco. Penelitiannya di Kamboja mengungkapkan, biaya yang dikeluarkan pelaku untuk satu kali hubungan seksual jangka pendek, 2 s.d. 5 dolar AS.

Korban pariwisata seks anak sering memiliki latar belakang sosio-ekonomi buruk. Tetapi, hal tersebut bukan satu-satunya. Korban bisa juga berasal dari kelompok minoritas, warga pengungsi, dan kelompok sosial yang termarginalkan. Mereka bisa anak laki-laki atau perempuan dan sebagian mereka telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran. Anak-anak yang bekerja, khususnya yang terlibat dalam industri pariwisata dan tergantung pada penghasilan musiman, yatim-piatu akibat AIDS, serta anak-anak jalanan dapat menjadi korban. Kadang-kadang, karena mereka dilahirkan di daerah tujuan wisata yang dicirikan dengan ketidakmerataan kekayaan antara para wisatawan yang berkunjung dan para penduduk setempat, dapat dieksploitasi dalam pariwisata seks anak. “Sulit menentukan jumlah korban secara pasti. Tetapi, diperkirakan jumlah anak yang dieksploitasi lebih kurang 60 ribu di Asia Tenggara,” ungkap Frans.

Menurut Chin, pariwisata seks anak tak bisa dilepaskan dari bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersial anak yang lain yaitu perdagangan anak, pornografi anak, dan prostitusi. Anak-anak yang dieksploitasi di berbagai daerah tujuan pariwisata seks anak biasanya berbasis lokal. Tetapi, anak-anak juga diperdagangkan secara internal atau ke luar negeri untuk melayani para wisatawan seks. Selain itu, daerah tujuan wisata sering menjadi daya tarik ekonomi yang membuat anak-anak lebih rentan terhadap janji-janji palsu tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi yang diiming-imingkan pelaku perdagangan anak. Dalam kasus pariwisata seks anak dan pornografi anak, wisatawan seks anak kerap memfilmkan atau mendokumentasikan foto anak-anak untuk konsumsi pribadi atau mengirimkannya kepada konsumen pornografi anak yang lain untuk mendapatkan keuntungan. Tahun 2008, Polda Bali menangkap seorang warga negara Swiss yang melakukan eksploitasi seksual terhadap anak di Prancis. Di laptopnya, ditemukan dokumentasi 3.000 foto anak-anak telanjang. Sebagian anak-anak itu berasal dari Thailand dan Bali.

Perkawinan anak dapat menjadi salah satu bentuk pariwisata seks anak jika anak yang dinikahkan tersebut digunakan sebagai objek pemuas

nafsu seks dengan imbalan uang atau pembayaran yang lain. Setelah dinikahkan dan hidup bersama dalam beberapa waktu, anak itu kemudian ditinggalkan begitu saja tanpa pernah menghubunginya kembali.

Menurut Irwanto, adat masyarakat yang membolehkan anak-anak menikah juga kerap menjadi salah satu faktor terjadinya eksploitasi seksual komersial terhadap anak di dunia pariwisata. Di Jawa Timur, anak bisa dikawinkan pada usia yang sangat muda, 12-13 tahun. Walaupun dalam KUHP disebutkan, orang yang melakukan hubungan seksual dengan anak-anak diancam hukuman 7-9 tahun, mereka tetap menjalaninya karena pasal itu merupakan pasal laporan, tidak efektif. “Payahnya lagi, sering terjadi hukum positif ditabrakkan dengan hukum adat atau agama,” keluh Irwanto yang juga Ketua Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial ini.

### **Risiko Tinggi**

Berbagai variabel yang terkait pariwisata seks anak adalah tempat terjadinya eksploitasi, kehadiran dan jenis perantara, lama tinggal, ukuran/luas daerah tujuan, situasi kehidupan anak dan situasi penginapan wisatawan tersebut. “Berbagai bentuk akomodasi, hotel berbintang lima sampai wisma, dapat menjadi tempat untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak,” ujar Chin.

Chin menegaskan, adanya penawaran akomodasi dengan konsep baru seperti *home stays*, rumah atau flat yang disewa secara pribadi juga menjadi isu penting yang harus dicermati. Para wisatawan dapat menyewa atau memiliki rumah sendiri yang memberi mereka akses tempat untuk mengeksploitasi anak-anak. “Akomodasi seperti itu merupakan tempat dengan kontrol minimal dari orang luar, tanpa petugas resepsionis, staf hotel, wisatawan lain atau penduduk setempat yang peduli. *Home stay* memiliki risiko tinggi bagi anak-anak karena terjadi interaksi yang lebih besar antara keluarga pemilik rumah dan turis,” katanya.

Menurut Irwanto, Sanur merupakan bagian sangat signifikan karena turis yang menyewa rumah umumnya memunyai pekerja rumah tangga anak kecil laki-laki atau perempuan. “Kalau hanya pekerja tidak apa-apa. Tetapi, tidak ada kajian lebih lanjut. Kami pernah melakukan investigasi mendalam, 5-6 tahun yang lalu, di rumah-rumah seperti itu dengan menyamar sebagai pembantu, tukang bakso di depan rumah, guru les. Hasilnya, beberapa anak dieksploitasi secara seksual,” ungkap Irwanto.

Internet juga menjadi salah satu sarana yang wajib diwaspadai. “Para wisatawan seks anak menggunakan internet dan teknologi komunikasi lainnya. Mereka melakukan perjalanan tanpa menyebutkan nama

sebenarnya,” ungkap Chin. Pernyataan itu diteguhkan hasil riset Marco, bahwa para wisatawan seks itu mencari teman sebaya melalui internet. “Mereka ngobrol melalui internet. Apalagi, anak muda kerap mencari teman melalui internet secara teratur. Biasanya, materi pembicaraan seputar pertemanan atau pengalaman,” papar Marco. Penelitiannya di New Zealand menunjukkan, para wisatawan seks anak adalah orang yang berusia kurang dari 30 tahun, pengguna internet dan layanan *chat*. Selain itu, internet juga digunakan untuk menyebarkan foto-foto yang melecehkan anak-anak tanpa diketahui korban.

Perjalanan dari satu negara ke negara lain bagi wisatawan seks anak juga kian mudah dengan adanya penawaran penerbangan berbiaya rendah dengan destinasi yang lebih banyak. “Apalagi, ditambah dengan dibukanya destinasi wisata baru,” kata Chin.

## **Kemiskinan dan Gaya Hidup Menjadi Pemicunya**

PEMERINTAH tak memungkiri adanya eksploitasi seks terhadap anak-anak di dunia pariwisata. “Itu memang ada. Mereka datang ke Batam atau Tanjung Pinang Jumat malam atau Sabtu pagi. Ada yang berbelanja, berolahraga, ada juga yang ingin berhubungan seks dengan anak-anak. Di Batam, tumbuh industri seperti itu, demikian juga di Lombok meski di permukaan kelihatan aman-aman saja,” ujar Bakri, Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI di sela-sela *Southeast Asia Conference on Child Sex Tourism*, di Sanur, 18-20 Maret.

Selain Batam, Tanjung Pinang, dan Lombok, daerah lain yaitu Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jakarta dan Sumatera Utara dicurigai menjadi tempat eksploitasi seksual komersial anak di dunia pariwisata.

“Ini memang eksekutif berkembangnya industri pariwisata seperti yang dialami di Thailand, Vietnam, atau Kamboja. Penyebabnya, kurangnya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga mereka mudah terkena janji-janji muluk dengan iming-iming gaji besar,” papar Bakri.

“Kemiskinan hanyalah salah satu penyebab,” kata Chin Chanveasna, *Executive Director* ECPAT Kamboja. Anak-anak memerlukan uang agar bisa sekolah, demikian juga keluarga mereka yang memerlukan uang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Para wisatawan seks anak itu menggunakan uang agar bisa mendekati mereka. “Mereka membangun

hubungan yang dekat dengan keluarga, membiayai anak-anak itu sekolah, memberi uang kepada keluarganya dan pada beberapa kasus, mereka membelikan tanah dan rumah bagi keluarga tersebut. Para orangtua yang anaknya menjadi korban eksploitasi seksual bahkan tak percaya bahkan orang tersebut menjadi pelaku kejahatan karena sikap baik yang ditunjukkan pada mereka,” jelas Chin.

Prof. Irwanto, Ph.D. Ketua Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak mengatakan, ekonomi dieksploitasi untuk kepentingan orang yang ingin menciptakan akses. “Saya tidak percaya kemiskinan selalu menjadi alasan utama karena saat ini ada hal lain yang harus diperhatikan sebagai pemicunya yaitu gaya hidup,” katanya. Konsumerisme tumbuh di kalangan masyarakat karena tiap saat mereka ditawarkan berbagai barang konsumtif dengan harga yang relatif kurang terjangkau bagi golongan ekonomi lemah. Tiap saat, anak-anak dihadapkan pada informasi yang penuh kesenangan, kemewahan, dan kebebasan. Jika latar belakang ekonomi keluarga pas-pasan, sangat tidak mungkin mereka dapat berhura-hura seperti anak-anak yang berkecukupan. Akibatnya, mereka mencari jalan pintas untuk dapatkan uang banyak dalam waktu singkat. “Ingin punya *handphone*, *gadget*, dsb. adalah bagian motivasi yang bisa disalahgunakan,” kata Irwanto.

Transformasi struktural dalam pertumbuhan ekonomi juga ikut berperan. “Era modernisasi yang berubah menjadi era globalisasi berpengaruh terhadap perempuan dalam memaknai seksualitas dan norma-norma sosial berbasis gender,” kata Kaoru Aoyama dari Kyoto University, Jepang. Menurut Kaoru, untuk mengubah keinginan perempuan terlibat dalam perdagangan seksual adalah tidak hanya mengubah peraturan, tetapi juga mengubah cara yang membuat perekonomian bertumbuh, kultur, relasi gender, hubungan keluarga, kebutuhan akan uang, keinginan untuk tampil trendi, dan kita menjadi bagian di dalamnya.

### **Peran Pariwisata**

Industri pariwisata juga dapat membantu memerangi eksploitasi seksual komersial anak seperti kampanye yang dilakukan grup Accor, “Against Child Sex Abuse”. “Kami memberi pelatihan lebih dari 5.300 staf dan membangun kesadaran pelanggan tentang eksploitasi seksual komersial anak sejak tahun 2004,” kata Ade Noerwenda, *Director of Human Resources* Accor Indonesia – Malaysia.

Berkat pemahaman yang diberikan kepada staf, dua tahun lalu mereka berhasil mengungkap kasus perdagangan anak yang dilakukan orangtuanya di Jakarta. Tamu hotel tersebut “membeli” keperawanan dengan harga Rp 5

juta dari orangtua si gadis. “Ada trik khusus untuk mengetahui apakah tamu yang *check in* (lapor masuk) adalah pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau bukan,” ujarnya. Misalnya, kalau ada lelaki dewasa yang lapor masuk dengan anak-anak. “Dari bahasa tubuhnya, bisa dicurigai. Begitu juga jika wajah anak tersebut murung terus. Nah, staf kami bisa bertanya, di mana ibunya, bukan langsung menuduh. Kalau bahasa tubuhnya aneh, kami pantau,” paparnya.

Menurut I Gede Ardika, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, ada nilai-nilai yang diterapkan dalam dunia pariwisata. Dalam selebaran yang dikeluarkan UNWTO (United Nations World Tourism Organizations), disebutkan tanggung jawab turis adalah respek terhadap hak asasi manusia. Eksploitasi dalam bentuk apa pun bertentangan dengan tujuan utama pariwisata. Eksploitasi seksual terhadap anak-anak adalah tindakan kriminal dan karena itu pelaku dapat dihukum di negara tempat terjadinya perkara atau di negara asal pelaku.

Hasil *quick survey* yang dilakukan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 27 Februari s.d. 2 Maret di Bali, Lombok, Batam, Jakarta dengan responden hotel, biro perjalanan wisata, spa, panti pijat dan pemandu wisata menunjukkan, di Bali dan Batam pemerintah lokal tidak pernah mengadakan pelatihan rutin kepada industri pariwisata terkait penghapusan eksploitasi seksual komersial anak, di Jakarta baru 14%, dan di Lombok 38% responden mengatakan pemerintah lokal rutin mengadakan pelatihan tersebut. Tentang penerapan kode etik pariwisata terkait penghapusan eksploitasi seksual komersial anak, di Bali 58%, Batam 100%, Lombok 75%, dan Jakarta 29% responden mengatakan sudah diterapkan. Terkait edukasi kepada staf dan pelanggan tentang penghapusan eksploitasi seksual komersial anak, di Bali 60%, Lombok 50%, Batam 20%, dan Jakarta 14% responden mengatakan sudah diimplementasikan. “Meski edukasi sudah dilakukan tetapi tidak intensif. Hal itu juga belum diterapkan kepada tamu hotel,” ungkap I Gusti Putu Laksaguna, Deputy Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam survei itu juga terungkap, industri pariwisata belum sepenuhnya menyebarkan informasi mengenai penghapusan eksploitasi seksual komersial anak kepada masyarakat, yaitu di Batam 100%, di Bali 75%, di Lombok 75%, dan di Jakarta 43%.

Padahal, hal itu sangat penting. Di Kamboja, ada program “Tuk Tuk Campaign Against Child Sex Tourism” yang dimulai tahun 2005. “100 pengemudi tuk tuk menjadi anggota ECPAT perlindungan anak-anak. Mereka dibekali melalui pelatihan mengenai *child safe tourism*. Tiap enam bulan, ada pelatihan penyegaran untuk memberi informasi terbaru mengenai perkembangan *child sex tourism*,” jelas Chin. Selain itu, ada juga “Child

Safe Network Program” yang diluncurkan tahun 2005 dengan wilayah konsentrasi di Provinsi Phnom Penh, Sihanoukville, Siem Reap and Kg. Cham. “Lebih 1.000 anggota komunitas dilatih. Kami juga meluncurkan *child safe hotline* dan menyebarkan informasi melalui anggota,” lanjut Chin.

### **Kampanye Media**

“*Human rights are important to our business, because our business is all about people,*” kata Suzy D. Hutomo dari The Body Shop Indonesia. Salah satu pelaksanaan hak asasi manusia yang diterapkan The Body Shop Indonesia adalah melakukan kampanye untuk penegakan hak asasi manusia dan perubahan sosial yang positif dan lingkungan.

Salah satunya, kampanye “Stop Sex Trafficking of Children and Young People” yang akan diluncurkan Agustus tahun ini. “The Body Shop sangat peduli terhadap masalah *child sex trafficking* karena *child sex trafficking* terjadi di seluruh negara dan memengaruhi jutaan anak-anak. Meski demikian, isu ini hanya mendapat perhatian yang sangat kecil dari masyarakat,” kata Suzy. Di Indonesia, 30% pekerja seks komersial berusia di bawah 18 tahun dan sebagian mereka berusia 10 tahun. 40 ribu s.d. 70 ribu anak-anak menjadi korban. “Angka ini terus bertambah karena masalah kemiskinan,” katanya mengutip data UNICEF.

Bagi The Body Shop, kampanye yang mereka lakukan adalah untuk menciptakan perubahan sosial dan lingkungan secara terus-menerus; menginspirasi dan menginformasikan konsumen mereka; memengaruhi pembuat kebijakan; dan mendukung pekerjaan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). “Kami yakin, perubahan sikap masyarakat dapat membuat perubahan yang besar,” ujar Suzy.

Hal serupa juga dilakukan MTV dengan melakukan kampanye MTV EXIT (*End Exploitation and Trafficking*). Alex Heath, *Distribution Manager* MTV mengatakan, diperkirakan 2,5 juta orang diperdagangkan di seluruh dunia dalam satu waktu. Lebih dari separuhnya berada di Asia dan Pasifik dan lebih dari 40% korbannya adalah perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan secara paksa ke dalam prostitusi. “Korban perdagangan manusia itu mengalami kekerasan seperti pemerkosaan, penyiksaan, aborsi, kelaparan, dan penyiksaan atau pembunuhan anggota keluarga mereka,” kata Alex. Dalam dekade terakhir, perdagangan manusia menjadi salah satu bisnis ilegal yang sangat menguntungkan. Diperkirakan, pendapatan melalui perdagangan manusia mencapai 7 s.d. 13 miliar dolar AS per tahun.

“Remaja, baik laki-laki atau perempuan, mudah menjadi korban perdagangan manusia karena kurangnya pengetahuan dan penipuan,” kata Alex. Karena itu, MTV yang memiliki pasar remaja yang luas, mencapai

300 juta rumah tangga di Asia, berusaha meningkatkan kesadaran dan pencegahan eksploitasi dan perdagangan manusia melalui kampanye MTV EXIT.

Pertama kali, program ini diluncurkan di Eropa tahun 2004 dan meluas ke Asia Pasifik tahun 2007 dengan memanfaatkan kekuatan dan pengaruh musik, film, dan selebritis untuk mengedukasi masyarakat dari berbagai belahan dunia dengan latar belakang sosio-ekonomi yang berbeda. “Sejak diluncurkan, kampanye ini telah menjangkau dan mengedukasi lebih dari 20 miliar orang,” ungkap Alex.

## **Korban Pedofil di Bali sudah Dua Generasi**

### **Berbagai Hambatan Mengungkap Kasus**

INVESTIGASI yang dilakukan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada di Bali tahun 2002 menemukan, korban pedofil di Bali sudah mencapai dua generasi. “Ada orangtua yang pernah menjadi korban pedofil dan ketika menikah dan memiliki anak, anaknya pun menjadi korban pedofil,” ujar peneliti PSKK UGM yang tak mau disebutkan namanya.

“Sebenarnya, kasus pedofil sudah ada sejak 1996,” ungkap Sang Ayu Alit S., S.H., M.M. Kepala Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polda Bali. Waktu itu, Tony Brown masuk ke Indonesia dan menetap di Lombok. Tetapi, kasus itu baru terungkap di Bali tahun 2004 karena sulit dibuktikan. Dari kasus tersebut, diketahui Tony Brown merupakan jaringan pedofil internasional. Dia melakukan perjalanan di daerah rawan eksploitasi seksual komersial anak seperti Vietnam, Kamboja, Meksiko. Dia juga pernah bertempat tinggal di Medan, Bogor, dan Tegal.

Ada juga kasus yang menghebohkan masyarakat, eksploitasi seksual terhadap pedagang acung anak-anak di Kuta. Kasus ini mengalami hambatan dalam penyidikan karena anak-anak itu tidak mengetahui pelakunya. Saat dieksploitasi secara seksual, mereka dalam keadaan tidak sadar dan sesudah itu ditelantarkan di jalanan.

“Kasus eksploitasi seksual komersial anak telah kami tangani sejak tahun 2001. Waktu itu pelakunya warga negara Italia, dengan korban sembilan anak dan dihukum 10 tahun penjara,” kisah Sang Ayu Alit. Tahun 2005, Polda Bali menyibak kasus pedofil warga negara Prancis di Karangasem. Kejadiannya tahun 2003. Sayangnya, saat di pengadilan, ada

hambatan. Korban tertekan, pengakuannya berubah. Yang digunakan hakim juga hanya pasal dalam KUHP bukan UU Perlindungan Anak. Akhirnya, dia divonis 2 tahun 6 bulan. Tetapi, karena Prancis menerapkan hukum ekstrateritorial, maka setelah tiba di Prancis, dia dihukum lagi. Pada tahun yang sama, terjadi kasus di Buleleng. Pelakunya warga negara Belanda yang berpura-pura menjadi pelatih sepak bola. Dia dihukum lima tahun penjara dan denda Rp 60 juta.

Tahun 2007, pedofil berwarga negara Jerman ditangkap di Serangan, Denpasar Selatan. Korbannya 11 anak. Dalam komputer dan kamernya ditemukan adegan dia mengonani anak-anak. Ada juga foto anak-anak untuk dijual kembali ke rekan-rekannya. Ada juga warga Belanda dengan korban dua orang dan warga Italia di Denpasar Selatan. “Orang Italia ini melarikan diri ketika mengetahui dirinya menjadi buronan seperti diberitakan di media massa. Wartawan kurang sabar, kami masih sembunyikan tetapi sudah diberitakan. Pelaku masih di Surabaya, langsung kabur tidak ke Bali lagi padahal polisi *nyanggong* di Bali. Pelaku utama tidak didapatkan tetapi pelaku perantara sudah diproses hukum. Sampai saat ini, dia masih buronan dan belum kembali ke Italia,” tutur Sang Ayu Alit.

Tahun 2008, kasus pedofil Australia, terjadi di Buleleng. “Kami juga bekerja sama dengan interpol. Ada warga Australia dengan lima paspor yang berbeda masuk ke Bali, akhirnya kami cari,” lanjutnya. Tahun lalu juga ada warga negara Swiss yang melakukan eksploitasi seksual komersial anak di Prancis. Dia melarikan diri ke Kamboja, Thailand, dan Bali. Akhirnya, dia diekstradisi. “Orang Swiss ini menyimpan 3.000 foto porno anak-anak. Anak-anak yang difoto sebagian anak Thailand dan Bali,” katanya.

Menurut Sang Ayu, cara pelaku mendekati korban bermacam-macam, yaitu menjadi orangtua asuh korban, membantu ekonomi keluarga korban, membantu perlengkapan olahraga, menyiapkan mainan anak-anak, memberikan hadiah berupa uang dan barang kepada korban, membantu masyarakat perdesaan yang miskin dan menjadi donatur panti.

Biasanya, cara pelaku melakukan eksploitasi seksual terhadap korbannya adalah dengan menyuruh korban mengonani kemaluan pelaku dan sebaliknya, melakukan sodomi dan oralsex. Mereka juga mengoleksi pornografi anak/korban, merekam adegan pornografi anak, dan memutar film porno kepada korban.

Dalam pengungkapan kasus, hambatan yang terjadi adalah korban tidak mau memberikan keterangan secara terus terang karena takut diejek teman-temannya. “Kita harus menyosialisasikan kepada masyarakat agar tidak mengucilkan korban supaya tidak ada korban berikutnya,” ajak Sang Ayu Alit. Hambatan lain, keengganan masyarakat untuk melapor. “Pelaku

sering memberi bantuan. Walaupun mereka curiga, tetapi jadi tak berdaya karena merasa berutang budi,” imbuhnya.

Kurangnya pemahaman masyarakat termasuk di lingkungan pariwisata juga menjadi salah satu hambatan. Seorang turis pernah ditangkap di bandara Sydney, Australia. “Turis itu baru saja tiba dari Bali. Dia kedatangan membawa foto-foto anak-anak telanjang. Saat dilacak, diketahui sebagian foto tersebut foto anak dan cucu seorang pemandu wisata di Bali. Si pemandu wisata tersebut tidak tahu jika tamunya adalah seorang pedofil. Karena bersikap ramah, si bule diajak ke kampungnya. Saat memotret, tak ada yang curiga. Ternyata, yang difoto di bagian alat kelamin saja,” kisahnya. “Yang sudah biasa bergaul dengan bule saja tidak paham mengenai masalah ini,” sambungnya. Masyarakat kurang waspada karena masih menganggap orang asing adalah tamu yang harus dihormati dan dianggap semuanya orang baik. Masyarakat kita bangga kalau anaknya bisa berbicara dengan orang asing dan dibiarkan tanpa pengawasan. Ini membahayakan.

Hambatan lain, kasus terlambat dilaporkan dan belum adanya persamaan persepsi aparat penegak hukum. “Kami berjuang agar bisa menegakkan UU Perlindungan Anak, masih ada jaksa yang menyatakan harus ada saksi yang melihat,” katanya. Dalam pengungkapan kasus, birokrasi juga bikin ruwet. Misalnya, perlu informasi penyelidikan. “Untuk mendapatkan kartu penumpang dari kantor imigrasi susah sekali, apalagi data yang sudah berbulan-bulan. Sekarang kami dapat informasi ada pedofil yang masuk ke Bali lima bulan lalu, cari data di kantor imigrasi sulit. Sekarang, komputer di kantor imigrasi rusak dan itu dibiarkan dengan alasan anggaran belum turun. Jawaban atas surat yang dilayangkan juga perlu waktu berbulan-bulan. Ada juga hotel yang tidak melaporkan tamunya. Padahal, informasi kepolisian Australia menyebut, tamu itu berangkat tanggal sekian ke Bali tetapi sampai di sini malah susah dilacak,” katanya.

Dalam hal penanganan kasus, Polda Bali bekerja sama perwakilan kepolisian Australia di Bali dan interpol. “Mereka menginformasikan orang-orang yang terdeteksi sebagai pedofil di negaranya. Kalau berisiko tinggi, kami lakukan pembuntutan. Kalau berisiko sedang sampai rendah, cukup pengawasan. Kami juga melakukan penolakan kalau diketahui tiba di Bali dengan alasan mereka bukan orang yang dikehendaki datang ke Indonesia karena memiliki catatan hukum yang buruk di negaranya,” katanya menjelaskan.

# Film Itu bukan hanya Bercerita tentang Kekerasan

SEPTEMBER 2007, Michael Chick bangun dari tidurnya. Seperti biasa, dia langsung membaca koran hari itu. Tetapi, pagi itu menjadi tidak seperti biasanya ketika dia membaca berita tentang Nurin Jaslin. Nurin adalah seorang bocah perempuan berusia enam tahun yang tewas dibunuh. Badannya dimasukkan dalam tas, ada ketimun dan terung yang dimasukkan dalam vaginanya.

“Peristiwa ini terjadi dalam jarak 1 km dari kantorku. Ini terjadi di Kuala Lumpur, yang disebut kota aman oleh pemerintah Malaysia,” katanya bernada kelu. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Michael Chick meninggalkan semua pekerjaannya di bidang periklanan yang ditekuninya selama 18 tahun dan bertekad menyuarakan orang-orang yang selama ini tak pernah didengar melalui film yang dibuatnya.

“Saya tidak dibayar untuk membuat film ini dan tidak mendapat komisi dari pemerintah mana pun. Saya hanya ingin dunia yang lebih baik dan masa depan yang lebih baik untuk generasi berikutnya,” kata Direktur Eksekutif dan Produser Silicon Films ini. Ia berkeliling ke negara-negara di Asia Tenggara untuk memproduksi film ini. Ada 60 kasus yang sudah direkamnya dalam waktu 1,5 tahun.

“Saya pernah mewawancarai seorang perempuan di Sumatera yang diperdagangkan ke Malaysia. Di Malaysia, dia dipenjara tiga tahun. Selama dipenjara, dia diperkosa dan melahirkan tiga anak. Anaknya langsung diambil segera setelah dilahirkan. Pada saat terakhir di penjara, dia dikeluarkan. Rambutnya dicukur, lalu ia dibuang ke laut. Dia selamatkan nelayan dan dibawa pulang ke Sumatera. Suaminya meninggalkannya. Sekarang, dia hidup dari belas kasihan tetangganya. Itu salah satu kisah dalam film saya,” tuturnya. Ada juga kasus di Jalam Hayam Wuruk Jakarta, prostitusi anak-anak. “Ada 10 anak di sana, tiga di antaranya hamil dan mereka berusia 12 tahun,” imbuhnya.

Film berdurasi dua jam yang itu bukan hanya bercerita tentang kekerasan. Tetapi, juga berkisah tentang isu yang sensitif seperti sunat pada perempuan dan hubungan seksual sadarah. Film ini dibuat bukan untuk menunjukkan Jakarta atau Bali punya kasus seperti itu. Tetapi, film ini ingin menunjukkan bahwa kasus tersebut terjadi di seluruh negara di Asia Tenggara dan sebetulnya, kasus di Asia Tenggara mewakili kasus serupa di

belahan dunia lain. “Kasus eksploitasi seksual bisa terjadi di mana saja,” ujarnya.

### **Pengalaman Fifi**

Sejak kelas 2 SMP, Ika Lusi Trifisusanti yang kini duduk di bangku kelas 3 SMA 17 Agustus Surabaya, terlibat dalam pendampingan korban eksploitasi seksual komersial anak melalui Plan International, organisasi nirlaba peduli anak.

Keterlibatan Fifi dalam kegiatan Plan dimulai saat Koalisi Perempuan Indonesia melakukan pendampingan di Wonokromo, daerah tempat tinggalnya. “Tempat tinggal saya dekat lokasi prostitusi. Kadang, lokasi itu malam-malam digerebek polisi. Kalau sudah begitu, para pekerja seks komersial itu lari ke permukiman penduduk. Tak jarang pula, anak-anak di lingkungan saya diajak menjadi pekerja seks komersial,” ungkapnya.

Menurut duta anak Indonesia dalam Kongres Dunia III Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Rio de Janeiro, Brasil tahun lalu ini, isu eksploitasi seksual komersial anak adalah salah satu isu anak-anak yang penting disuarakan. Banyak anak-anak dari daerah terpencil, dikirim ke tempat prostitusi. Ada kasus, seorang anak berusia 13 tahun pekerja kafe di Surabaya yang bergaji Rp 14 ribu per hari. Suatu hari, ada seseorang yang menawarkan bekerja di kafe di Batam dengan gaji Rp 200 ribu per hari. Dia pun tertarik. Oleh orangtuanya yang miskin, ia dinikahkan dengan orang yang dianggap kaya dan memberikan pekerjaan tersebut. Ternyata, saat tiba di Batam, ia dipekerjakan di tempat prostitusi.

“Karena tak mau, dia minta pulang. Eh, dia malah disuruh membayar ongkos perjalanan ke Batam dan baju-baju yang sudah dibelikan untuknya. Kalau tidak bisa membayar, ia tak boleh pulang. Dia dijual suaminya,” kata Fifi. Waktu dia sakit dan tetap harus bekerja, dia memukul pelanggannya. Pelanggannya tidak terima dan dilaporkan ke polisi. Perempuan itu akhirnya dipenjara. “Setelah keluar dari penjara, dia masuk ke tempat prostitusi lagi. Saat stres, dia memakai narkoba. Suatu saat, dia punya ide, menabung hasil kerjanya agar bisa melarikan diri dari tempat itu. Begitu balik ke Surabaya, masyarakat malah melecehkannya. Dia dicap menjijikkan,” lanjutnya.

Kisah lain, teman-teman sebayanya yang melakukan hubungan seksual dengan bebas. Ada seorang teman yang kerap “dipakai” oleh teman-teman sesama SMA. “Waktu saya beri tahu bahwa itu bentuk eksploitasi seksual, dia tak percaya. Dia malah menjawab, *wong* tinggal tidur bisa dapat uang, apa susah. Aku bisa beli ini, beli itu, beli apa pun yang aku inginkan. Apa pengaruhnya. Saya bilang lagi, nanti kamu kena penyakit, dia

tertawa. Penyakit apa, kita kan masih muda, begitu katanya,” cerita gadis kelahiran Surabaya, 27 Oktober 1991 itu.

Ketika Fifi mendapat buku tentang penyakit seksual, ia membawanya ke sekolah. Ia tunjukkan kepada teman-temannya. “Saya tunjukkan pada teman saya itu. Dia heran, penyakit apa itu. Saya jelaskan. Dia tak percaya bisa mengalami penyakit seksual kalau berhubungan seks. Akhirnya, setelah dia mendapat informasi yang cukup, dia berhenti melakukan hubungan seksual,” papar Fifi.

Ada juga cerita tentang seorang anak yang dilarang berpacaran oleh orangtuanya. Dia malah hamil dengan pacarnya. Saat tahu dirinya hamil, anak itu bercerita pada Fifi. “Dia mau menggugurkan kandungannya. Dia takut ketahuan orangtuanya dan takut tak bisa ikut ujian. Meski saya larang, ternyata dia tetap menggugurkan kandungannya dengan obat,” kata Fifi.

Menurut Fifi, ada dua kecenderungan anak-anak yang terlibat dalam eksploitasi seksual. “Kalau anak-anak dari kalangan menengah ke atas, mereka sebenarnya punya uang. Tetapi, mereka bilang kurang kasih sayang orangtua. Pernah temanku bilang, masak aku dikasih uang, uang, dan uang aja. Orangtuaku nggak pernah mikir aku perlu kasih sayang juga,” ungkapnya. Kalau menengah ke bawah, anak-anak dieksploitasi karena uang. Ada teman perempuannya yang setelah kematian ibunya dijual bapaknya. Bapaknya penjudi ayam, anaknya dijual kepada teman-teman penjudi ayam itu. Akhirnya, si anak hamil. Dia dikeluarkan dari sekolah dan bapaknya malah memarahinya, mengapa dia bisa hamil.

“Eksploitasi seksual itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Dengan kedok cinta, pacar kita pun bisa melakukan eksploitasi seksual,” katanya mengingatkan. Fifi yang bercita-cita jadi guru SD ini mengatakan, dampak eksploitasi seksual banyak sekali. “Kalau yang menjadi korban pasti trauma. Kita juga bisa mengidap penyakit seksual seperti sifilis dan bisa dikeluarkan dari sekolah,” ujarnya.

### **Hilangkan Identitas**

Menurut Dr. Mutia Prayanti, Sp. OG. Koordinator Pusat Krisis Terpadu RS Cipto Mangunkusumo Jakarta, faktor yang paling parah akibat eksploitasi seksual komersial anak adalah faktor mental. “Walau tak tampak depresi, rasa itu bisa muncul ketika ia dewasa,” ungkapnya.

Mutia pernah menemukan kasus, seorang anak yang dieksploitasi seksual saat bocah. Ketika itu, dia tak pernah bercerita kepada siapa-siapa. Namun, saat dewasa ia menghilangkan identitas keperempuannya meski tak ganti kelamin. Payudaranya ditekan agar tak menonjol. Waktu mengikuti wisuda, ia tak mau menggunakan kebaya dan sanggul. Akhirnya dia

memakai jas seperti laki-laki. “Kalau korban ditangani segera setelah kasus terungkap, mentalnya bisa normal kembali. Tetapi, perlu waktu yang berbeda-beda tergantung respons korban terhadap kejadian itu. Ada yang bisa normal setelah terapi dua tahun,” kata Mutia.

Yang penting dalam penanganan kasus eksploitasi seksual terhadap anak adalah penanganan psikoterapi, *support group*. Di pusat krisis yang digawanginya, ada kelompok dukungan agar bisa saling berbagi. Orangtua dan lingkungan sekitar anak juga perlu diberi pemahaman agar tak muncul stigma atas diri korban. “Kami juga melakukan kunjungan ke rumah-rumah agar bisa menatalaksana dengan baik,” katanya.

Masalahnya, meski layanan di pusat krisis digratiskan, korban dari keluarga miskin kerap kesulitan datang. “Mereka perlu uang untuk transportasi. Kalau datang, si anak tak mungkin sendiri. Orangtuanya pasti mengantar. Itu artinya, keluarga itu kehilangan pendapatan hari itu. Akhirnya, tetap saja masyarakat kecil jadi korban,” papar Mutia.

Di sisi lain, menurut Jipy Priscilia dari Plan International, isu eksploitasi seksual komersial anak adalah domain perlindungan anak dan partisipasi anak. “Anak selalu menjadi korban dan seakan-akan anak hanya objek. Plan memunyai sudut pandang lain, anak-anak mampu jadi agen perubahan, jadi subjek yang berperan aktif untuk masalah anak. Karena itu, Plan melibatkan anak-anak sebagai agen perubahan, memfasilitasi mereka sehingga anak-anak bisa mengatakan ‘tidak’ pada eksploitasi seksual komersial anak,” kata Jipy. Plan bekerja sama dengan instansi pemerintah menyediakan layanan Tesa alias Telepon Sahabat Anak dengan nomor 129. “Dengan menekan nomor ini di seluruh Indonesia, anak-anak bisa mendapatkan bantuan yang diperlukan,” kata Jipy.